

**PERAN PEMERINTAH DALAM SEKTOR EKONOMI UMKM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(STUDI ATAS KELOMPOK TANI "GOTONG ROYONG" DI DSN. GENITO LOR, DS.
GENITO, KEC. WINDUSARI, KAB. MAGELANG)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

SULSAN ELOK HARTANTI
03380476

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

**DRS. OCKTOBERRINSYAH, M. AG
MUYASSAROTUSOLICHAH, S.AG., S.H., M. HUM**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

UMKM sebagai suatu sistem dimana kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya.

Pemerintah Kab. Magelang turut berperan dalam pengembangan UMKM yang meliputi berbagai sektor ekonomi, tetapi dalam skripsi ini membahas secara khusus peran pemerintah terhadap kelompok tani " Gotong Royong" dengan segala persoalan yang meliputinya. Bagaimana peran pemerintah dalam sektor ekonomi UMKM di Dsn. Genito Lor, Ds. Genito, Kec. Windusari, Kab. Magelang, serta bagaimana pandangan Islam terhadap peran pemerintah dalam sektor ekonomi UMKM.

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipakai adalah pendekatan partisipatoris, yaitu pendekatan yang lebih mengedepankan pihak-pihak yang akan diberdayakan. Hal ini berarti bahwa pihak yang akan diberdayakan mendefinisikan masalah mereka sendiri, mencari masalah untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan melakukan tindakan yang dianggap bisa menyelesaikan masalah. Pendekatan ini menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka dan memberikan sarana yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri.

Setelah mengkaji secara mendalam terhadap masalah yang dihadapi masyarakat Dusun Genito Lor yang kemudian dikorelasikan dengan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Magelang akhirnya penyusun menyimpulkan bahwa perlu dirumuskan suatu kebijaksanaan pemberdayaan yang mengarah pada peningkatan kemampuan dan profesionalitas petani dan masyarakat pedesaan untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan lestari dengan memanfaatkan rekayasa teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktifitas, pendapatan petani, kesejahteraan masyarakat serta penghapusan kemiskinan.

Dalam hukum Islam, pentingnya keterlibatan pemerintah untuk mengadakan campur tangan dalam masalah perekonomian guna kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Akhirnya untuk lebih menampilkkan sistem ekonomi islami, maka konsep keadilan untuk pemerataan harus diterapkan. Keadilan yang dimaksud ialah tidak hanya memberikan bantuan baik materi maupun imateri kepada masyarakat secara merata tetapi juga melakukan kontrol terhadap berjalan atau tidaknya usaha mereka serta memberikan motivasi, spirit dan pembelajaran yang dilakukan oleh instansi yang ahli dalam usaha mereka, agar keadilan sosial yang dicita-citakan dapat terealisasi.

Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi
Saudari Sulsan Elok Hartanti

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sulsan Elok Hartanti

Judul Skripsi : "Peran Pemerintah Dalam Sektor Ekonomi UMKM Perspektif Hukum Islam
(Studi Atas Kelompok Tani "Gotong Royong" Di Dsn. Genito Lor, Ds. Genito, Kec. Windusari, Kab. Magelang)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 29 Nopember 2007 M
12 Zulqa'dah 1428 H

Pembimbing I


Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag
NIP:150 289 435

Muyassarotussolichah, SH, M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi
Saudari Sulsan Elok Hartanti

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sulsan Elok Hartanti

Judul Skripsi : "Peran Pemerintah Dalam Sektor Ekonomi UMKM Perspektif Hukum Islam
(Studi Atas Kelompok Tani "Gotong Royong" Di Dsn. Genito Lor, Ds. Genito, Kec. Windusari, Kab. Magelang)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 29 Nopember 2007 M
19 Zulqa'dah 1428 H

Pembimbing II



Muyassarotussolichah, S.A.,g.,S.H, M., IIum
NIP:150 291 023

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PERAN PEMERINTAH DALAM SEKTOR EKONOMI UMKM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(STUDI ATAS KELOMPOK TANI "GOTONG ROYONG" DI DSN. GENITO LOR, DS.
GENITO, KEC. WINDUSARI, KAB. MAGELANG)

Disusun Oleh:
Sulsan Elok Hartanti
NIM: 03380476

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada tanggal 19 Desember 2007/ 9 Dzulhijjah 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 9 Dzulhijjah 1428 H
19 Desember 2007 M



Panitia Munaqasah

Ketua Sidang

Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag
NIP. 150 289 263

Sekretaris Sidang

Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag
NIP. 150 289 263

Pembimbing I

Drs. Oktoberrinsyah, M. Ag
NIP:150 289 435

Pembimbing II

Muyassarotussolichah, S. Ag., S.H., M.Hum
NIP. 150 277 618

Pengaji I

Drs. Oktoberrinsyah, M. Ag
NIP:150 289 435

Pengaji II

Drs. Kholid Zulfa, M. Si
NIP. 150 266 740

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	Be
ت	tā'	t	Te
ث	śa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	De
ذ	zāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sīn	s	Es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	tā'	t̄	te (dengan titik di bawah)
ڙ	zā'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ڦ	fā'	f	-
ڦ	qāf	q	-
ڪ	kāf	k	-
ڻ	lām	l	-
ڻ	mīm	m	-
ڻ	nūn	n	-
ڻ	wāwu	w	-
ڻ	hā	h	-
ـ	hamzah	,	apostrof
ـ	yā'	y	"

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

Muta'qqidain

‘Iddah

3. Ta' Marbūtah diakhir kata

- a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

Jizyah

- b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

زَكَاةُ الْفِطْرِ Zakāh al-fitrī

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	Dammah	U	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جَاهْلِيَّةٌ Jāhiliyyah

- b. Fathah dan yā mati ditulis ā

يَسْعَى Yas'ā

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مَجِيدٌ Majid

- d. Dammah dan wāwu mati ū

فَرْوَضٌ Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بَنِيكَامٌ Bainakum

- b. Fathah dan wāwu mati au

قَوْلٌ Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ A'antum

شَكْرٌ تِمْ لَانْ La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآن Al-Qur'ān

الْقَيْمَلْ Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السَّمَاءُ As-samā'

الشَّمْسُ Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

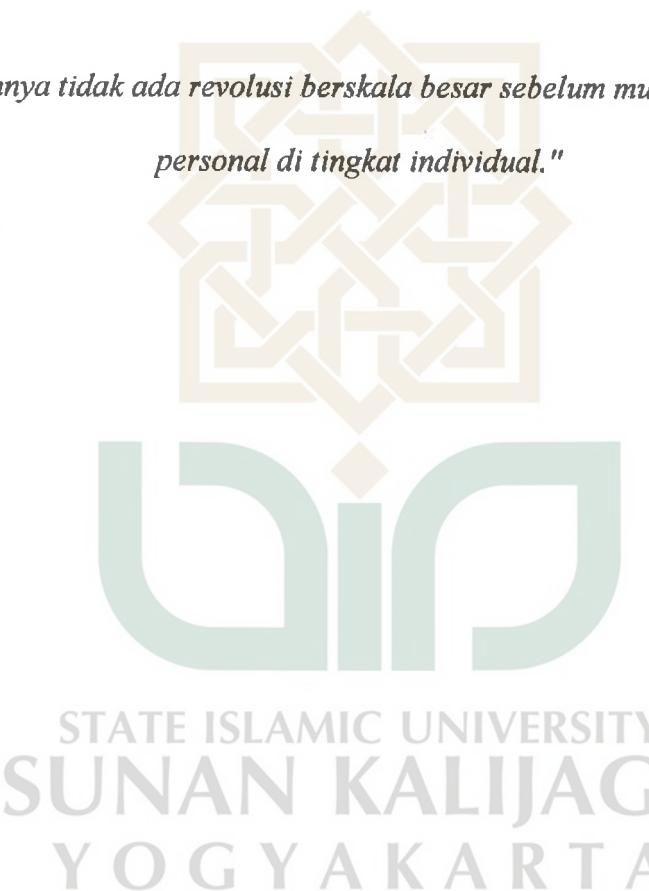
الْفَوْضَى ذُرْيَ زَوْلِي al-fawḍiyyah

اَلْسُنْنَةُ الْهُدَى Ahl as-sunnah

MOTTO

"Pelajarilah sejarah perjuanganmu sendiri yang sudah lampau agar tidak tergelincir dalam perjuangan yang akan datang"

"Sesungguhnya tidak ada revolusi berskala besar sebelum munculnya revolusi personal di tingkat individual."



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati,

Karya kecil ini kupersembahkan kepada:

.....Mereka,

Ayahanda Abdul Kafi Oesman dan Ibundaku Madiyah tercinta

Yang memberikan pendidikan untuk menjadikan hidup lebih “terdefinisi”

Juga kepada mereka Mbak. Nung, Bpk. Saro, Mas. Anton, Mbak. Afah yang telah

menyisakan kebijakan dan keagungan hidup berkeluarga

d'Wiwie, Mimok, Nathut, Yu'chon, Iqbal yang kadang mengingatkan betapa

mengagumkan hidup ini dengan tawa kecil mereka

Kepada "nya"

yang tak pernah lelah dengan cinta dan kasih sayangnya memberikan pelajaran

dalam meniti sebuah proses menuju “kesabaran”

serta perjalanan hidup, bahwa.....

“Hidup tanpa rintangan bukanlah hidup sejati...”

Orang harus hidup dengan api di bawah kakinya”

Terima kasih semuanya,

KATA PENGANTAR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدينأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلوة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk dan melimpahkan rahmat, hidayah dan ma'unah-Nya. Untaian shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan umat manusia dan kekasih Allah SWT, Muhammad SAW, figur manusia sempurna yang sudah selayaknya dijadikan tauladan dalam mengarungi biduk kehidupan ini.

Tiada kata yang patut penyusun ucapkan kecuali kata syukur “Al-hamdulillah” karena telah berhasil merampungkan karya kecil yang barangkali menurut orang lain tidak berarti apa-apa. Namun bagi penyusun ini adalah suatu keajaiban dari sang Khalik yang patut disyukuri.

Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada mereka yang telah berjasa dan membantu demi terselesaikannya skripsi ini yang berjudul ““Peran Pemerintah Dalam Sektor Ekonomi Ukm (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Perspektif Hukum Islam (Studi Atas Kelompok Tani “Gotong Royong” Di Dsn. Genito Lor, Ds. Genito, Kec. Windusari, Kab. Magelang)””

1. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bpk. Drs. Riyanta., M. Hum., selaku Kajur Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Ocktoberriyah, M. Ag., selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dengan segenap kesabaran dan ketulusan.
4. Muyassarotusslichah, S.Ag., S.H., M. Hum., selaku pembibing II yang telah membimbing dan memberi motivasinya.
5. Kawan-kawanku Dju, Iin. Q, eM 3 angkatan 2003, Teteh terima kasih untuk pinjaman komputernya, teman-teman Alamanda, wisma Putri Sari dll.

Penyusun menyadari bahwa karya ini sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan. Namun penyusun berharap sekecil apapun makna yang ada dalam tulisan ini, semoga dapat memberi manfaat. *Amin Ya Rabba al-Alamin.*



Penyusun

Sulsan Elok Hartanti



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KONSEP ISLAM DALAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
PEMBANGUNAN EKONOMI	19
A. Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi Dalam Norma Ekonomi Islam	19

1. Tauhid	19
2. Khilafah.....	20
3. ‘Adalah (Keadilan).....	22
4. Rububiyah	23
5. Tazkiyah.....	23
B. Pandangan Islam Dalam Strategi dan Kebijakan Pembangunan	
Ekonomi	24
1. Konsep Islam Terhadap Pembangunan Ekonomi	24
2. Kebijakan Dan Strategi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam ..	25
a. Dimensi Kebijakan Dalam Pembangunan Ekonomi	25
1) Pembangunan Sumber Daya Manusia	28
2) Pemerataan Kekayaan	29
3) Restrukturisasi Ekonomi	31
4) Restrukturisasi Finansial	32
5) Perencanaan Kebijakan Strategi.....	33
b. Elemen-elemen Strategi Yang Penting.....	34
1) Mekanisme Filter	34
2) Motivasi.....	35
3) Restrukturisasi Sosio-ekonomi	35
4) Peran Negara	36

BAB III TINJAUAN UMUM SEKTOR EKONOMI UMKM (USAHA

MIKRO, KECIL DAN MENENGAH)	37
A. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang.....	37
1. PD. BPR Bank Pasar (BAPAS) 69	37
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Diperindagkop).....	38
3. Dinas Pertanian	40
4. Dinas Peternakan	42
B. Diskripsi Kelompok Tani “Gotong Royong”	44
1. Sejarah Berdirinya Kelompok Tani “Gotong Royong”.....	44
2. Fungsi dan Tujuan Kelompok Tani “Gotong Royong”.....	45
3. Macam-macam UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Kelompok Tani “Gotong Royong”.....	45
4. Struktur Kelompok Tani dan Koperasi “Gotong Royong”.....	47

BAB IV ANALISIS TERHADAP PERAN PEMERINTAH DALAM

SEKTOR EKONOMI UMKM (USAHA MIKRO, KECIL DAAN

MENENGAH)..... 49

A. Analisis Terhadap Peran Pemerintah Dalam Sektor Ekonomi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).....	49
B. Peran Pemerintah Dalam Sektor Ekonomi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Perspektif Hukum Islam	53

BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
BIBLIOGRAFI	68
LAMPIRAN	
BIOGRAFI.....	I
TERJEMAHAN	II
CURRICULUM VITAE.....	III
DAFTAR RESPONDEN	IV
DAFTAR INTERVIEW	V





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemaknaan nilai-nilai Islam terhadap realitas sosial yang timpang adalah dengan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan umat. Begitu juga proses pembumian ajaran Islam sebagai teori besar, Islam harus dipahami, dikaji dan didialogkan dalam memandang dan menyikapi masalah-masalah sosial kemasyarakatan dengan memperhatikan dimensi kontekstual.¹

Pada saat situasi ekonomi tidak cerah yang dapat mengganggu pembangunan nasional, maka sangat mendesak untuk mengkaji ulang strategi pembangunan² masyarakat kita. Pengalaman kegagalan strategi ini, memberikan pelajaran tersendiri bagi Indonesia ketika krisis moneter juga melanda pada akhir tahun 1990-an yang merambah ke berbagai tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Fenomena ini menuntut adanya peran dan partisipasi berbagai pihak terutama pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negaranya di bidang kesejahteraan ekonomi yang sesuai dengan kondisi riil

¹ Merupakan dimensi yang menyangkut kondisi dan situasi umat serta fenomena-fenomena sosial yang dipengaruhi tuntutan waktu dan tempat sehingga menampilkan citra tertentu terhadap Islam.

² Konsep pembangunan di Indonesia sebagaimana pada banyak negara berkembang lainnya, yang menggagas strategi terhadap sentralisasi kebijakan ekonomi dan keuangan negara serta target stabilisasi politik yang bersifat represif oleh pemerintah pusat. Konsep ini memburu target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan paradigma “trickle down effect” (efek merembes ke bawah), mekanismenya adalah dengan memberikan perhatian kepada usaha besar substitusi impor dan menggesampingkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Indonesia. Dengan berupaya secara optimal untuk menciptakan peluang dan dengan mengakomodasi prinsip-prinsip paradigma pembangunan kemandirian lokal melalui konsep sistem ekonomi kerakyatan³ yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)⁴, meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, pariwisata, makanan dan lain sebagainya.⁵

Pencanangan tahun 2005 sebagai Tahun Keuangan Mikro Indonesia oleh pemerintah merupakan strategi yang tepat bagi upaya peningkatan pemberdayaan ekonomi rakyat di Indonesia dan menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil.⁶

Pada tahun ini prioritas kebijakan pemerintah diarahkan pada pemberdayaan UMKM yang mendominasi proporsi dunia usaha di Indonesia. Hal ini terbukti dengan kebijakan pemerintah melalui lima program pokok

³ Adalah suatu sistem dimana kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan, yang secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat dikuasakan dan diusahakan. Lihat Marzuki, *Pemikiran dan Strategi Memberdayakan Sektor Ekonomi UMKM Di Indonesia*, cet I, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2006), hlm. 11-12.

⁴ Menurut beberapa referensi, antara lain UU No. 9 Th. 1995 tentang Usaha Kecil, Instuksi Presiden No. 10 Th. 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah dan Buku I, Rencana Induk Pengembang Industri Kecil Menengah 2002-2004, Deperindag RI, UMKM sebagai berikut: *Usaha mikro* adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari 50 juta, omzet penjualan maksimum Rp. 250 juta/th, tenaga kerja 1-4 orang dan plafon kredit maksimal 50 juta. *Usaha kecil* merupakan usaha yang memiliki kekayaan bersih di atas 50-200 juta, omzet penjualan 1 M/th, tenaga kerja 5-19 orang, plafon kredit Rp. 500 juta. *Usaha menengah* yakni usaha yang memiliki kekayaan bersih di atas 200 juta-10 M., tenaga kerja 20-99 orang, plafon kredit sampai 5 M. Yiliana Rini Hardanti, "Peran Bank dan Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah." Dalam HG. Suseno, dkk., (Ed), *Reposisi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Perekonomian Nasional*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2005), hlm. 56.

⁵ Marzuki, *Pemikiran dan Strategi*, hlm. 11-12.

⁶ Widodo, "Presiden Canangkan Aksi Penanggulangan Kemiskinan," *Kompas*, (Minggu, 27 Februari 2005), hlm. 12.

pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) periode tahun 2004-2009.⁷

Jika disepakati bahwa kegiatan pertanian merupakan sektor utama dalam pembangunan dalam arti luas adalah salah satu bidang yang mendominasi sektor UMKM, yang mana kondisinya masih perlu perhatian yang serius dari pemerintah terutama karena bentuk unit usahanya yang kecil-kecil dan produktifitasnya masih rendah. Kesulitan pendanaan, keterbatasan akses pasar informasi dan teknologi, keterbatasan manajemen organisasi serta banyak persoalan lain yang membuat kondisinya sulit untuk berkembang.⁸

Kelompok tani⁹ “Gotong Royong” merupakan kelembagaan sosial ekonomi, yang secara swadaya dibentuk oleh masyarakat Genito Lor sejak 2005, dengan beranggotakan 27 orang. Pada awalnya sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai wahana yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari alam, pemerintah dan masyarakat sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, martabat, keberadaannya serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam

⁷ “Kebijakan dan Program ,“ <http://Situs> Resmi Kementerian KUKM-Kebijakan dan Program htm, akses 29 Mei 2007. Paket kebijakan ekonomi ini kemudian diperbaharui kembali yang dituangkan dalam Inpres No 6/2007. Tujuan paket Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang berisi empat kebijakan yang diharapkan bisa meningkatkan transparansi rencana kerja pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Lihat HA Hafidh Asrom, “Menunggu Realisasi Pemberdayaan UMKM,” *Kedaulatan Rakyat*, (Sabtu, 7 Juli 2007), hlm. 14.

⁸ Marzuki, *Pemikiran dan Strategi*, hlm 15.

⁹ Beberapa kelompok tani yang ada di Desa Genito, seperti “Sari Rahayu” yang ada di Dsn. Genito Kidul, kelompok tani “Maju” dan “Gotong Royong” di Dsn. Genitor Lor.

pengambilan keputusan publik. Beberapa sektor ekonomi yang digeluti masyarakat Genito Lor antara lain pertanian, peternakan dan makanan olahan.¹⁰

Dinamika perkembangan UMKM di dusun Genito Lor masih terbentur dengan beberapa kendala. Pendanaan atau permodalan menjadi persoalan urgen yang dihadapi kelompok, ketidakberdayaan ini yang juga menjadi hambatan dalam mengembangkan bidang peternakan dan makanan olahan. Meskipun faktor SDM dan teknologi juga merupakan kendala dalam mengembangkannya. Masalah lain dalam pemberdayaan dan pengembangan kelompok tani khususnya etos perkoperasian yang kurang memadai.. Minimnya partisipasi para anggota dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut bidang usaha dan permodalan, pengawasan dan kegiatan penting lainnya yang dapat meningkatkan swadaya kelompok tani. Hal inilah yang menyebabkan koperasi “Gotong Royong” mengalami stagnasi.¹¹

Selain itu, ketergantungan terhadap teknologi seperti persediaan bibit unggul, pestisida dan bahan kimia pertanian lainnya menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat Dusun Genito Lor. Serta rentannya hama tanaman, juga mahalnya harga-harga teknologi pertanian modern baik harga bibit unggul maupun harga pupuk dan pestisida kimia lainnya. Bahkan yang memprihatinkan adalah dominasi pupuk oleh para tengkulak dan kondisi ini menyebabkan kelangkaan pupuk yang menjadikan harga pupuk menjadi mahal.

¹⁰ Wawancara dengan Bp. Dwi Hartoyo, Kepala bidang Humas kelompok tani “Gotong Royong”di Dsn. Genito Lor, tanggal 12 Juni 2007.

¹¹ Wawancara dengan Bp. Muh Saro, Ketua kelompok tani “Gotong Royong” Genito Lor, Genito, Windusari, Magelang, tanggal 14 April 2007.

Mengingat perjalanan kelompok tani “Gotong Royong” sebagai salah satu “bagian” industri kecil yang digeluti masyarakat Genito Lor. Serta mempunyai peranan dalam pembangunan masyarakat. Adanya prospek untuk dikembangkan, maka sangat perlu mendapat sentuhan pembangunan untuk lebih baik lagi agar menjadikan mereka memiliki daya untuk mewujudkan tujuannya. Sebab pada kenyataanya, sektor yang dekat dengan karakter masyarakat Genito Lor ini masih jauh dari “profesionalisme” dan kontinuitas usahanya masih tersendat-sendat. Hal ini menjadi motivasi penyusun, bagaimana pemerintah menstimuli dalam memberdayakan dan mempertajam arah untuk kesejahteraan rakyat dalam ekonomi rakyat ini.

B. Pokok Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapatlah ditarik beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam objek kajian penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimana peran pemerintah dalam sektor ekonomi UMKM Di Dsn. Genito Lor, Ds. Genito, Kec. Windusari, Kab. Magelang?
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran pemerintah dalam sektor ekonomi UMKM?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan peran pemerintah dalam kebijakannya terhadap pemberdayaan sektor ekonomi UMKM serta kontribusinya yang signifikan dalam pengembangannya
- b. Untuk menggambarkan bagaimana peran dan kontribusi pemerintah dalam pemberdayaan sektor ekonomi UMKM dalam tinjauan hukum Islam.

Adapun kegunaan yang penyusun harapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk memberikan kontribusi pemikiran mengenai kebijakan baru bagi pemerintah dalam memberdayakan sektor ekonomi UMKM pada khususnya dan aktifitas ekonomi pada umumnya dalam kajian hukum Islam.
- b. Hasil penelitian ini dapat diformulasikan dengan pembangunan ekonomi yang lebih arif, bijaksana tentunya dalam perencanaan praktis di lapangan, yaitu pemberdayaan sumber daya lokal (dengan memperkuat kemampuan rakyat) yang berorientasi pada pengembangan penuh partisipasi dari masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Sebenarnya telah banyak tulisan dan pembahasan tentang pemberdayaan sektor ekonomi UMKM ditemukan baik dalam bentuk buku maupun artikel-artikel dalam bentuk lepas. Namun, di sini perlu dipertegas lagi bahwasanya pembangunan ekonomi yang memang harus menekankan pada pertumbuhan dengan pemerataan. Serta pembangunan manusianya melalui partisipasinya secara total yang akan menuju pada terwujudnya suatu keadilan sosial dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembahasan dan pengkajian ekonomi tentang pemberdayaan sektor ekonomi UMKM oleh pemerintah dipastikan memiliki banyak karya ilmiah diantaranya: *Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dalam Perspektif Hukum Islam*¹² adalah kajian pustaka yang membahas tentang bagaimana pola pemberdayaan UKM yang dimotori negara.

Umer Chapra, dalam bukunya *Islam Dan Pembangunan Ekonomi* yang mencoba memaparkan sebuah strategi pembangunan Islam dan menunjukkan bahwa adanya potensi untuk mendorong pembangunan yang berkeadilan.

Dalam kaitan di atas, dipaparkan beberapa elemen yang berpotensi besar dan saling berhubungan serta sangat efektif dalam strategi Islam, antara lain: restrukturisasi sosio-ekonomi yang memungkinkan individu memenuhi kepentingan diri mereka hanya dalam batas-batas kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi.¹³

Pendekatan antroposentriknya Musa Asy'arie yang merajut doktrin Islam yang dipadu dalam kegiatan kewiraswastaan. Sehingga mengantarkan pada perlunya suatu fikih yang memberdayakan ekonomi umat. Perlunya solidaritas ekonomi yang dipacu lebih kuat untuk mengimbangi solidaritas politik, serta potensi ekonomi umat baik sebagai pasar maupun tenaga kerja secara sinergis perlu dikembangkan untuk memberdayakan ekonomi umat.¹⁴

¹² Muzamir, *Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2004)

¹³ Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, cet I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

¹⁴ Musa Asy'arie, *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, cet.I, (Yogyakarta : Lembaga Studi Filsafat Islam, 1997).

Mubyarto, pakar ekonomi kerakyatan dengan salah satu konsep pemikirannya, yaitu bahwa ilmu ekonomi terapan di Indonesia harus memihak rakyat hal ini sesuai dalam amanat pasal 33 UUD'45. Negara harus mampu menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dan negara juga mampu mengendalikan arah kegiatan ekonomi swasta agar sesuai dengan asas demokrasi ekonomi.¹⁵

Adapun kajian lain yang mengulas dan menelaah tentang UMKM yaitu *Pemikiran Dan Strategi Memberdayakan Sektor Ekonomi UMKM Di Indonesia* oleh Marzuki. Buku ini memuat beberapa pikiran sederhana namun fundamental tentang bagaimana seharusnya mekanisme kebijaksanaan para pelaku ekonomi, khususnya pemerintah agar dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi berbagai keputusan-keputusan yang diambil kiranya dapat memberi manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat kebanyakan.¹⁶

Dalam karya ini penyusun mencoba mendobrak keadaan stagnasi(berupa kemacetan) terhadap permasalahan yang dihadapi kelompok tani “Gotong Royong” pada khususnya dan UMKM pada umumnya. Di samping itu, penelitian ini dapat merangsang yang lebih mendalam dan lebih menyeluruh dalam konteks ekonomi kerakyatan terutama sekali kaitannya dengan pencapaian terhadap kesejahteraan rakyat.

¹⁵ Mubyarto, *Ekonomi dan Keadilan Sosial*, cet.I, (Yogyakarta: Aditya Media, 1995).

¹⁶ Marzuki, *Pemikiran dan Strategi*, hlm. 33.

E. Kerangka Teoretik

Ada beberapa aspek yang menyebabkan pemikiran hukum Islam mempunyai kemampuan dalam menemukan relevansinya, dengan perubahan waktu dan tempat menjadikannya terasa luwes dalam menghadapi berbagai macam realitas dan lingkungan.

Salah satunya adalah pemikiran hukum yang berorientasi pada kemaslahatan. Para ulama dan fukaha¹⁷ mengatakan bahwa *al-Ahkam at-Taklifiyah* dalam Islam selalu ada kaitan kuat dengan masalah yang diupayakan. *Istislah* merupakan penetapan hukum dengan dasar pertimbangan kemaslahatan. Maslahah yang dimaksud disini adalah kemaslahatan yang sejalan dengan syari'. Dalam definisinya Al Ghazali menekankan bahwa kemaslahatan yang dimaksud harus sesuai dengan tujuan syara'. Orientasi kemaslahatan tersebut nampak jelas seperti yang dikemukakan Al-Ghazali, yakni melindungi kepentingan *maqashidu at tasyri' al-Khamsah* (lima tujuan syara'). Adalah agama, jiwa, harta, akal dan keturunan dan sebaliknya segala konsep dan upaya yang dapat mengganggu kelima masalah tersebut termasuk mafsadah.¹⁸

Maksud syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yakni menarik manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan.

¹⁷ Berbagai pandangan mengenai konsep kepentingan umum ini, seperti Imam Malik menyebut *Maslahah Mursalah* sebagai kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dengan Ahmad bin Hanbal menyebut *istislah* untuk *Maslahah Mursalah* dengan maksud mencari pemecahan yang terbaik bagi kepentingan umum. Hanya golongan Syafi'iyah dan Hanafiyah yang menolak sumber ini, dengan argumennya bahwa sumber ini bukanlah suatu yang pokok. Lebih jelas lihat kembali A. Rahim, I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 111. Lihat juga Hasbi Ash-Siddieqy dalam *Falsafah Hukum Islam*, cet. V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 335-338.

¹⁸ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, Edisi Abu Hamid bin Muhammad (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 950.

Sedangkan kemaslahatan manusia tidak terbatas macamnya yang berkembang dan berubah mengikuti situasi serta ekologi masyarakat.¹⁹

Pemahaman inipun juga ditawarkan oleh Ibnu Hazm sebagai mujtahid mutlak dalam masalah keadilan sosial dan kemaslahatan umum.²⁰ Walau bagaimanapun pemikiran yang ditawarkan Ibnu Hazm ataupun para sahabat lainnya dalam lite'atur fikih sudah barang tentu ingin mencapai *maqhasidu tasyri'* dalam merealisasikan keadilan sosial. Seperti masalah keadilan sosial manakala dalam realitas konkritnya sangat dipengaruhi oleh keadilan ekonomi yang akan menyediakan sarana-sarana untuk mentranslasikan keadilan sosial dalam bentuknya yang konkret.²¹ Sudah menjadi kelaziman hidup setiap orang akan terikat dengan hak dan kewajiban seseorang yang harus selalu menyadari bahwa pada dirinya disamping kewajiban ada suatu hak yang akan selalu dituntut untuk dilaksanakan dan ditunaikan.²²

Dalam hal ini Ibnu Hazm memperlihatkan bahwa manusia dalam aktifitas sosial ekonominya mengalami perubahan pola hidup. Begitu pula dalam pelaksanaan timbal balik antara hak dan kewajiban sebagai muslim. Faktor suksesnya bagi hubungan timbal balik tersebut adalah dengan adanya perhatian antara hak disamping perhatian terhadap kewajiban. Doktrin Ibnu Hazm

¹⁹ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. III, (Bandung: al-Ma'arif, 1993), hlm. 105.

²⁰ Praktis, karakteristik metode ijtihad yang dipakai Ibnu Hazm dalam membaca nass posisinya berpisah antara nass dengan akal. Keputusan ini berangkat berlandaskan nass secara lahir. Dalam pandangannya, hukum dan juga metodenya yang diambil dari nass secara tersurat bukanlah hasil otak-atik mujtahid. Dengan pendekatan yang digagas dari segi kebahasaan yang tetap berpegang dari makna zahir, yang ditunjuki nass dengan tidak keluar dari apa yang disuratkan nass.

²¹ Altar Gaufar (Ed), *Tantangan Islam*, alih bahasa Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka, 1982), hlm. 166.

²² Ibnu Hazm, *Al- Muhalla*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), III: 159.

tentang keadilan sosial ini, terutama tentang kewajiban atas harta dan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut tampaknya beliau cenderung pada penekanan pada kesadaran dari orang-orang yang terkena kewajiban untuk menunaikan haknya.

Namun disamping itu, dari sisi lain tidak menutup kemungkinan doktrin di atas tertuju pada kewajiban berupa materi semata. Tapi juga bagaimana penekanan yang bersifat imateri diterapkan. Hal ini tentunya menuntut adanya dorongan spiritualitas (spirit, moral) dalam merealisasikan keadilan sosial. Pun tidak kecil pula arti peran pemerintah untuk turut campur tangan dalam mewujudkan keadilan sosial ini. Dengan memberikan jaminan dan sebagai pengontrol untuk kewajiban yang harus ditunaikan. Karena ketika segi materi jumlahnya sudah berlebihan, maka ini akan terlepas dari tanggung jawab sosial. Dalam pandangan Ibnu Hazm, campur tangan negara hanya diperlukan jika sudah terjadi keenjangan antara hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Sehingga sifatnya pemerintah di sini sifatnya insidentil.²³

Keadilan disyariatkan karena kedudukannya sebagai salah satu usaha untuk memelihara kesejahteraan masyarakat sehingga dapat didasarkan pada asas-asasnya, yang antara lain:

1. kebebasan yang mutlak
2. persaman manusia yang sempurna
3. jaminan sosial yang kuat

Untuk ini ada tiga hal penting yang perlu mendapatkan perhatian. *Pertama*, kerangka sistem sosial yang ideal. *Kedua*, kondisi riel kehidupan

²³ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, hlm.158.

sosial dan posisi masyarakat di dalam berbagai sektor kehidupan. Ketiga, upaya strategis yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat.

*Maslahah*²⁴ ditinjau dari segi kepentingan umum adalah keadilan dalam masyarakat, dimana tidak mungkin tercipta tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela dan memberi pertolongan kepada yang lemah juga dalam masalah yang menyangkut perekonomian. Dalam Islam, pemerintah sebagai lembaga formal yang mengekspresikan kehendak anggota masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab pemerintah yang tidak hanya terbatas pada keamanan dalam negeri tetapi pertanggungjawaban pemerintah ini harus merupakan program untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran.²⁵

Dalam pemikiran Ibnu Taimiyah tentang perlunya kebijakan pemerintah dengan intervensinya dalam usaha pemberdayaan sektor ekonomi UMKM. Bahwasanya suatu negara atau pemerintahan yang merupakan wahana untuk menegakkan agama maupun mendekatkan diri pada Allah SWT. Sedangkan pemberdayaan dalam hal ini sektor ekonomi UMKM tidak mungkin terealisasi dengan baik tanpa adanya otoritas (*Quwwah*) dan pemerintah (*Imarah*). Hal ini berarti bahwa penyelenggaraan suatu pemerintahan merupakan suatu media bagi pelaksanaan *maqasid* (tujuan) hukum. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang perlu juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi sehingga dapat

²⁴ Sumber hukum ini tersirat dalam al-Qur'an, lihat al-Zumar (39): 18.

²⁵ M. Faruq an. Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalisme dan Sosialis*, Alih bahasa H. Muhamadi Zainuddin dan A Bahaudin Noersalim, cet III, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 59-61.

mendatangkan kemajuan bagi masyarakat yang tidak menyimpang dari hukum Allah SWT.²⁶

Mengacu pada teori kebijakan fiskal dan moneter oleh Milton Friedman, tentang upaya pemerintah dalam menstabilkan perekonomian. Program yang ditawarkan pemerintah dalam memberdayakan sektor ekonomi UMKM adalah sejalan. Bahwa teori tersebut menekankan kebijakan ekonomi dalam menjalankan roda perekonomian, akan lebih baik jika para pembuat kebijakan disesuaikan dengan kemampuan mereka. Artinya, bagaimana seharusnya para pembuat kebijakan menggunakan teori fluktuasi ekonomi jangka pendek untuk menjaga perekonomian tetap berada pada jalur yang diinginkan.²⁷

F. Metode Penelitian

Dalam mengumpulkan data, menjelaskan dan menyimpulkan obyek pembahasan dalam skripsi ini, beberapa metode yang digunakan penyusun antara lain:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitik.²⁸ Bahwa dengan melakukan pengamatan terhadap masalah yang dihadapi kelompok tani "Gotong Royong" di Dsn Genito Lor, Ds. Genito, Kec. Windusari, Kab.

²⁶ Taqiyu ad-din Taimiyah, *as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Islahi ar-ra'i wa ar-Ra'iyyah*, (Mesir: Dar-Kitab al-Arabi, tt), hlm. 138.

²⁷ N. Gregory Mankiw, *Teori Makro Ekonomi*, alih bahasa Imam Nurwan, cet. v (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 374.

²⁸ Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 26.

Magelang. Penelitian ini bersifat kualitatif, dimana menggunakan prosedur yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku seseorang.²⁹ Selanjutnya berusaha memaparkan semua data yang ada kemudian dianalisis serta diinterpretasikan kondisi-kondisi atas keterangan yang ada.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data baik primer maupun sekunder, maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Interview

Interview sebagai sebuah kegiatan menghimpun data dengan jalan melakukan tanya jawab lisan secara bertatap muka (*face to face*) dengan siapa saja yang diperlukan dan dikelihendaki untuk menggali data secara mendalam data yang terkait dengan penelitian ini. Jenis interview yang dipakai adalah interview bebas terpimpin, interviewer mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan yaitu pengurus³⁰ dan anggota kelompok tani serta pemerintah daerah³¹ yang sudah dipersiapkan secara lengkap dan cermat. Pertanyaan disampaikan bebas dan tidak terlalu formal. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang sektor ekonomi UMKM yang ada di dusun Genito Lor, desa Genito, Kec. Windusari, Kab. Magelang.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 3

³⁰ Yaitu Bpk. Muh. Saro selaku ketua kelompok tani "Gotong Royong" , Bpk. Dwi Hartoyo sebagai kepala bidang humas dan Sutinah sebagai bendahara makanan olahan.

³¹ PD. BPR. BAPAS 69 Magelang, yaitu Bapak Daru Priyatno dan Bpk. Mustafa selaku penggerak UMKM di Kab. Magelang.

b. Observasi

Metode ini diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode pengamatan terlibat, hal mana peneliti mengumpulkan data-data keterangan yang diperlukan adalah dalam keadaan memiliki hubungan emosional dan sosial dengan para pelaku yang diamatinya. Keterlibatan peneliti dalam pengamatan ini dimaksudkan untuk lebih memahami situasi dan kondisi para pelaku UMKM. Penyusun dalam melakukan pengamatan berada dalam tingkat setengah-tengah, artinya penyusun menjadi mediator bagi kegiatan-kegiatan yang diamatinya.

c. Dokumentasi

Teknik ini merupakan pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.³² Beberapa data yang digunakan antara lain diktat-diktat³³ dan buku-buku yang berhubungan dengan sektor ekonomi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) yang digeluti

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1990), hlm. 136.

³³ *Meretas Jalan Baru*, *Katalog Profil UMKM* dari PD BAPAS 69 Kab. Magelang, RENSTRA (Rencana Strategi) 2005-2009 dan Lembaran Daerah Kab. Magelang dalam Perda Kab. Magelang No. 24 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Orgaisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Magelang, dari dinas Pertanian Kab. Magelang. *Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Magelang* dan *Rencana Strategi Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Magelang 2005-2009*, dari dinas Peternakan Kab. Magelang. *Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah 2005-2009. Kebijakan Pembangunan Deperindagkop dan Penanaman Modal Kab. Magelang serta Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Deperindagkop Kab. Magelang*, dari Deperindagkop dan Penanaman Modal Kab. Magelang, serta dokumen dari kelompok tani "Gotong Royong" berupa struktur organisasi dan sejarah berdirinya.

masyarakat Genito. Serta gambaran mengenai kelompok tani “Gotong Royong”.

3. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara diskriptif yang sebagian besar berasal dari wawancara dengan nara sumber. Catatan hasil pengamatan yang kemudian dianalisis dengan instrumen deduktif yaitu menganalisis dari fakta-fakta yang umum untuk kemudian diteliti dan hasilnya dapat menjawab persoalan yang bersifat khusus.³⁴ Maka akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai peran pemerintah dalam sektor ekonomi UMKM.

4. Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipakai adalah pendekatan partisipatoris, yaitu pendekatan yang lebih mengedepankan pihak-pihak yang akan diberdayakan. Hal ini berarti bahwa pihak yang akan diberdayakan mendefinisikan masalah mereka sendiri, mencari masalah untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan melakukan tindakan yang dianggap bisa menyelesaikan masalah.³⁵ Pendekatan ini menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka dan memberikan sarana yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri.³⁶

³⁴ Winarno Surachmat (Ed), *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 1978), hlm. 265.

³⁵ Ike Janita Dewi, *Penelitian Partisipatoris Dalam Pemberdayaan UKM*. (HG. Suseno Dkk. Ed), *Reposisi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Perekonomian Nasional*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2005), hlm.217.

³⁶ Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 63.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I dalam penyusunan skripsi ini meliputi pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub bab, yakni latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bagian pembahasan. Bagian pertama berisi tentang prinsip dasar pembangunan ekonomi dalam norma ekonomi Islam, yang terbagi dalam beberapa konsep antara lain: tauhid, khilafah, 'adalah (keadilan), rububiyah dan tazkiyah. Bagian kedua membahas tentang pandangan Islam dalam kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Poin pertama mengulas tentang konsep Islam terhadap pembangunan ekonomi. Poin kedua membahas tentang kebijakan dan strategi dalam pembangunan ekonomi Islam, item pertama memaparkan tentang dimensi kebijakan dalam pembangunan ekonomi Islam. Terdiri dari pembangunan sumber daya manusia, pemerataan kekayaan, restrukturisasi ekonomi, restrukturisasi finansial serta perencanaan kebijakan strategi. Item kedua akan dipaparkan mengenai elemen-elemen startegi yang penting. Terbagi menjadi mekanisme filter, motivasi, restrukturisasi ekonomi dan peran negara.

Dalam bab III, berhubung ini adalah penelitian lapangan, maka akan digambarkan kondisi umum objek penelitian yang mengetengahkan kebijakan pemerintah dalam sektor ekonomi UMKM secara umum, meliputi landasan kebijakan, program-program pemberdayaan serta koperasi dan UMKM. Dilanjutkan dengan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Magelang, akan dipaparkan beberapa kebijakan-kebijakan dan program-program dari dinas-dinas yang terkait dengan bidang-bidang yang digeluti kelompok tani

“Gotong Royong”. Kemudian akan dideskripsikan mengenai kelompok tani “Gotong Royong” yang terdiri dari: sejarah singkat berdirinya, fungsi dan tujuannya, dan usaha-usaha yang bergerak dalam kelompok tani “Gotong Royong”

Bab IV ini merupakan analisis terhadap peran pemerintah dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan tinjauan hukum Islam terhadap peran pemerintah dalam memberdayakan UMKM. Dalam hal ini akan diuraikan tentang peran dan kontribusi pemerintah khususnya lembaga-lembaga atau institusi pemerintah daerah Kab. Magelang dalam memberdayakan para pelaku sektor ekonomi mikro kecil dan menengah yang kebanyakan para petani, yang kemudian akan dianalisis dalam perspektif Islam.

Bab V penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji persoalan peran pemerintah dalam memberdayakan sektor ekonomi UMKM di Kab. Magelang, khususnya bagi kelompok tani "Gotong Royong" secara seksama, maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa:

1. Peran pemerintah Kab. Magelang berupa penataan yang mengedepankan potensi kawasan, aspirasi, kemampuan, serta kebutuhan masyarakatnya. Peran dalam bentuk nyata itu juga terlihat dalam kebijaksanaan pemberdayaan yang mengarah pada peningkatan kemampuan dan profesionalitas petani dan masyarakat pedesaan untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan lestari dengan memanfaatkan rekayasa teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktifitas, pendapatan petani, kesejahteraan masyarakat serta penghapusan kemiskinan.
2. Kebijakan pemerintah Kab. Magelang dalam bidang pertanian ditujukan untuk memajukan pertanian, mangusahkan agar pertanian lebih produktif, menaikkan produksi dan efisiennya. Namun, kebijakan tersebut masih memerlukan penyempurnaan agar prinsi-prinsip yang mengedepankan keadilan, kesejahteraan, kasih sayang dan persaudaraan. Bagaimana seharusnya kebijakan untuk petani ketika mengeksplorasi lahan produktif

tidak mengarah pada eksplorasi lahan baik dengan cara tradisional modern/kimia pertanian yang dalam jangka panjang bisa merusak lahan. Bagaimana dengan komersialisasi pertanian seperti kebutuhan produksi yang menggunakan teknik modern dan pupuk kimia dan kebijakan harga yang bisa dijangkau oleh petani.

3. Peran pemerintah sebagaimana tersebut dalam kesimpulan nomor 1 dan 2 sudah memenuhi prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam, atau paling tidak terdapat nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Sebab di dalam Islam, untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan kemaslahatan bersama perlu adanya intervensi pemerintah dalam masalah perekonomian. Pemerintah sudah menerapkan konsep keadilan meskipun belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak hanya memberikan bantuan baik materi maupun immaterial kepada masyarakat secara merata tetapi juga melakukan kontrol terhadap berjalan atau tidaknya usaha mereka serta memberikan motivasi, spirit dan pembelajaran yang dilakukan oleh instansi yang ahli dalam usaha mereka, agar keadilan sosial yang dicita-citakan dapat terealisasi.
4. Adapun realisasi pemeliharaan oleh pemerintah sebagaimana yang dikehendaki oleh syari' adalah untuk kemakmuran bersama dan keadilan sosial. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan memberikan bantuan sosialnya yakni bantuan yang bersifat sementara yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Bantuan sosial yang

diberikan berupa bantuan santunan hidup, bantuan sarana usaha ekonomi produktif atau bantuan sarana kelompok usaha bersama. Bantuan ini berupa bahan atau peralatan dalam menunjang usaha produktif. Tindak lanjut dari pemberian bantuan sosial adalah rehabilitasi sosial sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan masyarakat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Saran

1. Selayaknya dan tentunya tidak dapat dihindari lagi bagi pemerintah khususnya Kab. magelang yang harus memainkan peran yang konstruktif. Suatu peran yang menempatkan hal-hal yang dianggap perlu untuk kepentingan umum yang lebih luas di bawah kontrol dan manajemen pemerintah.
2. Islam mengakui peranan modal sebagai faktor produksi. Di sini diharuskan adanya pembagian untung rugi atau sistem bagi hasil dengan cara yang adil. PD. BAPAS 69 sebagai bank milik pemerintah daerah yang didalamnya penyandang dana juga menanggung rugi jika ada.
3. Penting kiranya bagi pemerintah khususnya dalam memberdayakan masyarakat yaitu dengan membangun manusianya terlebih dahulu sebelum membangun infrastruktur dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini tentunya untuk menciptakan keseimbangan antara masyarakat terpenuhi apa yang menjadi haknya, yaitu sejahtera baik secara materi maupun imateri. dan kewajiban pemerintah dalam mewujudkan kedilan sosial.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIBLIOGRAFI

Al-Qur'an

Departemen Agama: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1978.

Fiqh dan Usul Fiqh

Ash-Siddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Doi, Rahman. I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Ghazali, *Al-Mustashfa*, Edisi Abu Hamid bin Muhammad, Beirut: Dar al Fikr, t.t.

Hazm, Ibnu, *Al Muhalla*, Beirut: Dar al Fikr, t.t

Khollaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh wa Tarikh wa Tasyri' al-Islami*, Jakarta: tnp., 1972.

Rahman A Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fikih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

S. Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Tiara, 1993.

Taimiyah, Ibnu, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi islah al-Ra'i wal al Ra'iyah*, Kairo: Dar al Kitab al 'Arabi, 1951.

-----, *Tugas Negara Menurut Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Widodo, Amin, *Fiqh Siyasah Dalam Sistem Kenegaraan Dan Pemerintahan*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1994.

Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: al-Ma'arif, 1993.

Ekonomi Islam

Ahmad Basyir, Azhar, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, 1998.

An Nabahan, M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam ; Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalisme dan Sosialisme*, Alih bahasa H. Muhamdi Zainuddin dan A Bahauddin Noersalim, Yogyakarta : UII Press, 2002.

Asy'arie, Musa, *Islam, Etos Kerja Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: LESFI, 1997.

Chapra, Umar, *Sistem Moneter Islam*, cet I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

-----, Umer Chapra, *Islam Dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

-----, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Manan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.

Naqvi, Syed Nawab Haider, *Etika Dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*, Bandung: Mizan, 1985.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Lain-lain

Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Salam Semesta, 2003.

Ansyari, Fuad, *Islam Kaffah; Tantangan Sosial dan Aplikasinya Di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Asrom, H.A. Hafidh, "Menunggu Realisasi Pemberdayaan UMKM," *Kedaulatan Rakyat*, Sabtu, 7 Juli 2007.

Asy-Syal, Abdul Hadi Asy, *Islam Membina Masyarakat Adil Dan Makmur*, Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987.

Daud, Ahmad, *Allah dan Manusia*, Jakarta: Rajawali, 1983.

Ekonomika, Edisi 01 Th. XXIX, Yogyakarta: LPM Ekonomika FE. UII, 2005.

Kartasasmita, Ginandjar *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO, 1996.

Hardanti, Yuliana Rini, "Peran Bank dan Lembaga Keuangan Mikro dalam Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah." Dalam HG. Suseno, dkk., (Ed), *Reposisi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Perekonomian Nasional*, Yogyakarta: Univ. Sanata Dharma, 2006.

Harsoyo, *Peranan bank Dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*, Makalah disampaikan pada Seminar Regional dalam rangka Dies Natalis FE. Universitas Sanata Dharma XII, 16 April 2005.

Hasan, Muhammad Tholhah, *Islam Dalam Perspektif Sosiolultural*, Jakarta: Lantabora Press, 2005.

<Http://Situs> Resmi Kementerian KUKM-kebijakan dan program.htm, "Kebijakan dan Program," akses tanggal 29 Mei 2007.

<Http://www.UMKM-online.com>, Kadin UMKM, "Mengenal Kadin UMKM", akses 11 April 2007.

Husaini, Waqar Ahmad, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, Bandung: Pustaka, 1983.

Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: AMP YKPN, 1997.

Mankiw, N. Gregory, *Teori Makro Ekonomi*, Alih bahasa Imam Nurmawan, Jakarta: Erlangga, 2003.

Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Marzuki, *Pemikiran Dan Strategi Memberdayakan Sektor Ekonomi UMKM Di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2006.

Mikkelsen, Britha, *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

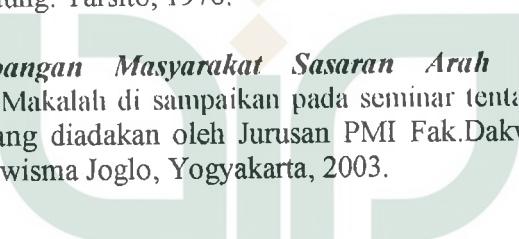
Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Mubyarto, *Ekonomi dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Aditya Media, 1995.

Muzamir, *Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2004)

Nugroho, Iwan dan Rochmin Dahuri, *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial Dan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES, 2004.

- Rais, Amin, (ed), *Islam di Indonesia, suatu ikhtiar mengaca diri*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sophiaan, Ainur Rofiq, (Ed), *Etika Ekonomi Politik: Elemen-elemen Strategi Pembangunan Masyarakat Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- Suisyanto dkk (Ed), *Islam Dakwah Dan Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Jurusan PMI Fak. Dakwah UIN Sunan Kalijaga kerjasama dengan IISP-CIDA, 2005.
- Djojohadikusumo, Sumitro, *Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Tasmara, Toto, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- UU No. 9 Th. 1995 tentang Usaha kecil, Instuksi Presiden No. 10 Th. 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah dan Buku I, Rencana Induk Pengembang Industri Kecil Menengah 2002-2004.
- Widodo, "Pemerintah Canangkan Aksi Penanggulangan Kemiskinan", Kompas, 27 Februari 2005.
- Winarno, Surachmat (Ed), *Dasar Dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1978.
- Wuradjji, *Pengembangan Masyarakat Sasaran Arah Dan Tujuannya*, Yogyakarta: Makalah di sampaikan pada seminar tentang pengembangan masyarakat yang diadakan oleh Jurusan PMI Fak.Dakwah tanggal 10-12 Okt 2003, di wisma Joglo, Yogyakarta, 2003.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA